

**(BER)SILATURAHMI: NEGOSIASI KOMUNITAS, OTORITAS,
DAN KEANGGOTAAN DALAM PRAKTIK WACANA DI INDONESIA**

Dian Ekawati¹, Isma Novitasari²

¹Departemen Linguistik, Universitas Padjadjaran Bandung, ² Independent researcher
d.ekawati@unpad.ac.id ; novitasari@daad-alumni.de

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana silaturahmi sebagai konsep budaya sentral di Indonesia yang menekankan harmoni relasional, kunjungan timbal balik, dan kohesi sosial, secara diskursif diaktualisasikan dan secara strategis direkontekstualisasikan dalam pembicaraan institusional. Berakar pada tradisi Islam dan tertanam dalam kehidupan sosial Indonesia, silaturahmi telah lama dipahami sebagai kewajiban moral yang mempertahankan ikatan komunal dan identitas kolektif. Namun, makalah ini menunjukkan bahwa silaturahmi kini berfungsi sebagai sumber diskursus yang dinamis, terutama dalam konteks birokrasi, di mana ia dapat menandakan kepatuhan simbolis, diplomasi relasional, atau navigasi terhadap hierarki institusional. Dengan menggunakan pendekatan analisis percakapan (Sidnell & Enfield, 2022), pragmatik budaya (Wang & Kádár, 2023), dan analisis wacana kritis (Wodak & Meyer, 2023), penelitian ini menganalisis 18 wawancara semi-terstruktur yang direkam secara audio tentang inisiatif masyarakat, program keterlibatan komunitas, dan kolaborasi antarorganisasi dengan pejabat pemerintah (Pemda) dan aktivis LSM (LSM) di Jombang, Jawa Timur. Wawancara ini dilakukan di bulan Juli 2025, masing-masing berdurasi 45–90 menit, dan ditranskripsikan dengan menggunakan konvensi Jefferson. Hasilnya menunjukkan tiga pola konsep silaturahmi yang berbeda. Dalam konteks birokrasi, pejabat membedakan antara modus keterlibatan formal dan kekeluargaan (familial), menggunakan pertemuan timbal balik untuk membangun kepercayaan (trust), dan kesesuaian (alignment) dengan mempertahankan evaluasi kondisional terhadap kemitraan. Di lembaga berbasis agama (pesantren), akses memerlukan sowan (kunjungan) kepada pemimpin agama yang bertindak sebagai perantara antara program eksternal dan otoritas agama. Dalam forum sipil, duduk bersama memfasilitasi negosiasi di mana LSM menawarkan dan pejabat menyambut (menerima) tawaran kemitraan dengan tetap mempertahankan batas-batas institusional. Meskipun silaturahmi terus membangun identitas moral dan hubungan institusional, responden secara strategis menggunakan konsep ini untuk menavigasi ketegangan antara formalitas birokrasi dan harapan komunitas, bahkan seringkali mengubah pertemuan informal menjadi kerja relasional yang formal. Studi ini berkontribusi pada pemahaman bagaimana konsep-konsep yang tertanam dalam budaya berkembang di bawah tekanan organisasi kontemporer, menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional mengalami refungsionalisasi pragmatis dalam diskursus publik Indonesia modern. Studi ini memperluas pendekatan analisis percakapan dengan memberikan wawasan kritis tentang bahasa, kekuasaan, dan perubahan sosial dalam konteks Asia Tenggara pasca-kolonial.

Kata kunci: silaturahmi, negosiasi, komunitas, otoritas, praktik wacana

ABSTRACT

This study explores how silaturahmi as a central cultural concept in Indonesia emphasizing relational harmony, mutual visitation, and social cohesion is discursively enacted and strategically recontextualized in institutional talk. Rooted in Islamic tradition and deeply embedded in Indonesian social life, silaturahmi has long been understood as a moral obligation that sustains communal bonds and collective identity. However, this paper demonstrates that silaturahmi now functions as a shifting discourse resource, particularly in bureaucratic contexts, where it may index symbolic compliance, relational diplomacy, or careful navigation of institutional hierarchies. Building on Conversation Analysis (Sidnell & Enfield, 2022), cultural pragmatics (Wang & Kádár, 2023), and Critical Discourse Analysis (Wodak & Meyer, 2023), this research analyzes 18 audio-recorded semi-structured interviews about civic initiatives, community engagement programs, and interorganizational collaboration with government officials (Pemda) and NGO activists (LSM) in Jombang, East Java. These interviews conducted between March and August 2025, each lasted 45–90 minutes and was transcribed using Jefferson notation. The results show three distinct institutional patterns emerge. In bureaucratic contexts, officials distinguish formal from kekeluargaan (familial) engagement modalities, using reciprocal meetings to build kepercayaan (trust) and kesesuaian (alignment) while maintaining conditional evaluation of partnerships. In faith-based institutions (pesantren), access requires sowan (respectful visitation) to religious leaders who mediate between external programs and religious authority. In civic forums, duduk bersama (sitting together) enables negotiation where NGOs menawarkan (offer) and officials menyambut (receive), establishing partnership while preserving institutional boundaries. While silaturahmi continues to construct moral identity and institutional rapport, participants strategically used the concept to navigate tensions between bureaucratic formality and communal expectations, often transforming what could be surface-tataran encounters into legitimized relational work. This study contributes to understanding how culturally embedded concepts evolve under contemporary organizational pressures, demonstrating that traditional values undergo pragmatic refunctioning in modern Indonesian public discourse. It expands CA's cultural scope while offering critical insight into language, power, and social change in postcolonial Southeast Asian contexts.

Kata kunci: silaturahmi, negotiation, community, authority, discourse practice

1. PENDAHULUAN

Silaturahmi, yang berasal dari bahasa Arab *ṣilat al-raḥīm*, secara harfiah berarti "menyambung tali kasih sayang". Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, *silaturahmi* adalah salah satu konsep paling sentral dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Berakar pada ajaran Islam yang mewajibkan pemeliharaan hubungan antarmanusia, konsep ini telah lama melampaui makna religiusnya dan menjadi fondasi budaya interaksi sosial sehari-hari di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam budaya Jawa dan Sunda khususnya, *silaturahmi* dimanifestasikan melalui praktik-praktik konkret seperti kunjungan timbal balik, saling memberi makanan atau hadiah lainnya, forum musyawarah, dan pertemuan informal yang secara kolektif memperkuat ikatan komunitas.

Namun, di tengah arus modernisasi birokrasi dan transformasi institusional, *silaturahmi* pun bertransformasi. *Silaturahmi* tidak lagi ada di tataran individu atau lingkungan masyarakat umum, melainkan meluas ke ranah institusi. Mulai dari aktivis LSM hingga pejabat pemerintah daerah, secara strategis menggunakan praktik *silaturahmi* untuk menavigasi ruang-ruang kekuasaan yang seringkali kaku dan hierarkis. *Silaturahmi* bukan sekadar fenomena sosial keagamaan lagi, melainkan sebuah diskursus baru yang digunakan secara terencana untuk menegosiasikan otoritas, membangun legitimasi, atau mengelola keanggotaan dalam suatu praktik wacana. Menyikapi transformasi fenomena *silaturahmi* ini, menarik untuk melihat bagaimana elemen-elemen linguistik membentuk konsep dan makna baru dari *silaturahmi*.

Penelitian ini merupakan bagian dari program evaluasi dari riset sebuah LSM Internasional yang membahas tentang keterlibatan anak muda dalam memperjuangkan hak kesehatan reproduksi mereka. Program ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya dilakukan di wilayah Jombang, Jawa Timur. Untuk konteks penelitian tentang *silaturahmi* ini, Jombang diambil sebagai sumber data, karena Jombang yang memiliki karakteristik unik sebagai pusat tradisi pesantren dan gerakan *civil society* yang aktif. Di wilayah dengan akar budaya Islam yang kuat ini, *silaturahmi* memainkan peran kritis sebagai "kunci pembuka gerbang" otoritas, baik otoritas pemerintahan maupun otoritas keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah mekanisme „*silaturahmi*“ dan „*bersilaturahmi*“ sebagai kerja relasional yang dilegitimasi secara budaya dalam konteks institusional kontemporer.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- (1) Bagaimana konsep *silaturahmi* diaktualisasikan secara diskursif dalam interaksi institusional antara LSM, pejabat pemerintah, dan otoritas keagamaan di Jombang?
- (2) Strategi linguistik dan pragmatik apa yang digunakan oleh aktor sosial dalam „*bersilaturahmi*“ untuk menegosiasikan otoritas, membangun kepercayaan, dan menentukan batas-batas keanggotaan komunitas?
- (3) Bagaimana nilai-nilai tradisional *silaturahmi* mengalami pergeseran pragmatis dalam menghadapi tekanan modernisasi birokrasi dan transformasi digital?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KESENJANGAN PENELITIAN

Studi mengenai *silaturahmi* dalam konteks masyarakat Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif. Dari sudut pandang antropologi, Ariana (2023) meneliti fenomena *tilik*, yaitu kunjungan gotong royong kepada tetangga yang sakit, sebagai bentuk konkret *silaturahmi* di daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian tersebut menekankan fungsi kohesi sosial dan penguatan harmoni relasional dalam komunitas rural. Dari perspektif sosiologis-komputasional, Situngkir (2008) mengeksplorasi bagaimana informasi menyebar secara organik melalui jejaring *silaturahmi* dalam struktur sosial alumni, serta memosisikan *silaturahmi* sebagai modal sosial sekaligus jaringan informasi yang efisien.

Selain dari sisi sosiologi dan antropologi, dari sisi linguistik dan pragmatik Rahardi (2020, 2023) memberikan fondasi kuat mengenai penggunaan penanda fatis pada kata *sampun* dan tindak tutur semu-direktif dalam bahasa Jawa sebagai strategi untuk menjaga "wajah" (*face*) dan harmoni interaksional. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, ujaran berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan proposisi, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan relasi sosial. *Silaturahmi* beroperasi pada tataran pragmatis yang serupa: *silaturahmi* adalah tindakan untuk "menghubungkan kasih sayang" yang secara teknis linguistik berfungsi sebagai pembangun konteks sebelum proposisi inti disampaikan. Selain itu, Ewing (2001) menyoroti bagaimana penanda diskursus *ya* dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai bentuk solidaritas dan afiliasi dalam percakapan sehari-hari, yang relevan dengan cara *silaturahmi* membangun keselarasan interaksional.

Melihat transformasi *silaturahmi* dari ranah individu menjadi institusional, penting untuk melihat penelitian dari Heritage & Clayman (2021) yang menekankan bahwa pembicaraan dalam institusi

(*institutional talk*) memiliki struktur yang berbeda dari percakapan sehari-hari. Menurut Heritage & Clayman (2021), struktur interaksi institusional umumnya berorientasi pada tujuan, terikat pada identitas tertentu, dan memiliki keterbatasan interaksional yang spesifik. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Carbaugh (2022), setiap interaksi sosial juga membawa beban wacana budaya yang mendalam. Dalam konteks Indonesia, garis antara pembicaraan informal (*kekeluargaan*) dan formal sering kali kabur melalui praktik *silaturahmi*, memungkinkan adanya navigasi hierarki yang lebih fleksibel namun tetap sopan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Wang & Kádár (2023) mengenai kesantunan dan *face* dalam interaksi Asia Timur dan Tenggara, di mana menjaga harmoni relasional sering kali lebih diutamakan daripada efisiensi tugas semata.

Meskipun *silaturahmi* dikenali dan diakui sebagai konsep budaya yang fundamental, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar studi masih memandang *silaturahmi* sebagai praktik sosial yang statis, sehingga lebih berupa sebuah kewajiban moral tanpa mengkaji bagaimana ia berfungsi sebagai sumber daya diskursus yang dinamis dalam konteks negosiasi kekuasaan institusional. Kedua, belum banyak studi yang membedah bagaimana nilai tradisional ini mengalami "refungsionalisasi pragmatis" dalam menghadapi tekanan modernisasi birokrasi dan tantangan digital. Ketiga, masih jarang ditemukan penelitian yang menggabungkan detail mikro dari *Conversation Analysis* (CA) dengan kritik makro dari *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk menganalisis wacana *silaturahmi* dan *bersilaturahmi* sebagai kerja relasional yang strategis dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dan mengisi celah tersebut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan kerangka analitik multidimensional. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (1) Analisis Percakapan (*Conversation Analysis/CA*) secara umum untuk mengetahui struktur percakapan institusional dengan pendekatan dari Heritage & Clayman (2021) tentang percakapan institusional; (2) Pragmatik Budaya dengan menggunakan kerangka Wang & Kádár (2023) untuk menganalisis kesantunan, *face*, dan nilai budaya dalam interaksi di Asia Tenggara sebagai acuan umum untuk kemudian ditarik ke dalam konteks budaya Indonesia; dan (3) Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) berdasarkan Wodak & Meyer (2023) untuk mengungkap dinamika kekuasaan, ideologi, dan relasi sosial yang terkandung dalam bahasa.

3.2 Sumber Data dan Konteks Penelitian

Data primer terdiri dari 18 rekaman audio wawancara semi-terstruktur yang dikumpulkan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Juli 2025. Jombang dipilih sebagai lokasi penelitian karena keunikannya sebagai pusat tradisi pesantren sekaligus wilayah dengan gerakan civil society yang aktif. Durasi setiap wawancara berkisar antara 45–90 menit, dengan total durasi rekaman lebih dari 20 jam. Responden penelitian ini meliputi perwakilan dari beberapa institusi kunci, yaitu WCC (Women's Crisis Center) Jombang, sebuah LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan isu gender, SAPA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) sebuah organisasi advokasi masyarakat sipil, beberapa tokoh-tokoh pesantren dan perwakilan Komisi Nasional Disabilitas (KND), perwakilan Kantor Dinas Kementrian Agama Kabupaten Jombang, perwakilan Dinas Kesehatan, dan perwakilan sekolah. Selain wawancara mendalam, untuk menambah reliabilitas data diadakan pula diskusi kelompok terpusat di WCC dengan pelajar dan santri.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Wawancara semi terstruktur ini dilakukan langsung dan direkam secara audio. Seluruh rekaman ditranskripsikan menggunakan konvensi Jefferson secara umum dan tidak mendetil, karena yang diperlukan dalam konteks penelitian ini adalah inti dari percakapan tersebut yang terkait dengan diksi *silaturahmi* dan sinonimnya secara semantis dan pragmatis. Dengan demikian, kami juga tidak melakukan transkripsi detil untuk jeda, intonasi, tumpang tindih bicara (*overlap*), dan fenomena prosodik lainnya.

Selanjutnya analisis dilakukan melalui tiga tahap berurutan, yaitu dengan (1) mengidentifikasi segmen wacana yang mengandung leksikon *silaturahmi* atau konsep-konsep semantis yang berkaitan; (2) analisis mikro menggunakan CA untuk mengidentifikasi pola sekuensial dan struktur preferensi; serta (3) analisis makro menggunakan CDA untuk mengkaji bagaimana struktur kekuasaan, ideologi, dan konteks sosiohistoris terrefleksikan dalam pilihan bahasa para responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dari 18 wawancara di Jombang mengungkapkan bahwa praktik *silaturahmi* tidak berfungsi sebagai basa-basi sosial semata, melainkan sebagai strategi diskursif yang digunakan secara terencana untuk menegosiasikan batas-batas institusional. Tiga pola utama teridentifikasi sebagai mekanisme *doing silaturahmi* dalam konteks kekuasaan.

4.1 Silaturahmi sebagai Pembangun Relasi dalam Birokrasi

Data dari aktivis SAPA menunjukkan bahwa dalam konteks birokrasi, *silaturahmi* berfungsi untuk mengubah persepsi pemerintah terhadap LSM, yang awalnya "pihak luar" menjadi "mitra terpercaya." Strategi ini dilakukan secara proaktif, di luar agenda program resmi. Hal ini tampak dalam tuturan berikut:

(1) "...kita dekati pendekatan secara aktif juga. Jadi tidak hanya ketika ada kegiatan baru diundang... Jadi jangan sampai ketika ada maunya gitu baru komunikasi. Jadi di luar itu juga kita tetap ada komunikasi." (Responden SAPA)

Secara pragmatis, ungkapan "*jangan sampai ketika ada maunya gitu baru komunikasi*" mencerminkan pemahaman mendalam tentang etika relasional Indonesia. Konstruksi *jangan sampai* berfungsi sebagai tindak tutur semi-direktif (Rahardi, 2023) yang mengekspresikan evaluasi normatif terhadap pola komunikasi yang tidak ideal. Dengan melakukan komunikasi intensif di luar program resmi, aktor sosial membangun apa yang oleh responden disebut sebagai "sistem membangun kepercayaan." Proses ini secara bertahap membalikkan dinamika kekuasaan. Jika sebelumnya LSM yang harus "meminta" ruang, melalui *silaturahmi* pemerintah justru menjadi pihak yang secara aktif mengundang.

4.2 Praktik Sowan dan Negosiasi Otoritas Pesantren

Di Jombang yang memiliki tradisi Islam yang kuat, akses terhadap komunitas sering kali harus melewati gerbang otoritas keagamaan melalui praktik *sowan*—kunjungan hormat kepada tokoh agama atau pemimpin pesantren. WCC Jombang menggambarkan bagaimana pendekatan ini digunakan untuk memasuki lingkungan pesantren yang konservatif terkait isu gender dan kesehatan reproduksi:

(2) "...beberapa kali kami menginisiasi diskusi-diskusi di layanan berbasis komunitas pesantren bersama dengan pengasuh-pengasuh beberapa waktu lalu... Biasanya cuma dikontak oleh pengasuh di Darul Ulum Jombang... beliau minta di-assist tim sama WCC untuk didampingi melatih petugas-petugas pondok." (Responden WCC Jombang)

Analisis terhadap data (2) mengungkapkan transformasi relasional yang signifikan. Pergeseran dari pola WCC-sebagai-pemohon menjadi pola *pengasuh*-sebagai-pemrakarsa menunjukkan keberhasilan *silaturahmi* sebagai mekanisme "penjajakan nilai." Ketika pengasuh pondok—sebagai otoritas tertinggi dalam hierarki pesantren—mengambil inisiatif untuk melakukan kontak, hal tersebut merupakan tindakan legitimasi moral yang sangat kuat. Dalam perspektif CDA, praktik *sowan* ini bukan sekadar kesantunan; ia adalah strategi navigasi kekuasaan (Wodak & Meyer, 2023). WCC secara strategis menempatkan diri dalam posisi yang *face-saving* bagi otoritas pesantren, sehingga kolaborasi dapat terjalin tanpa menyebabkan "kehilangan muka" di pihak mana pun.

Di Jombang yang memiliki tradisi Islam yang kuat, akses terhadap komunitas sering kali harus melewati gerbang otoritas keagamaan melalui praktik *sowan*—kunjungan hormat kepada tokoh agama atau pemimpin pesantren. WCC Jombang menggambarkan bagaimana pendekatan ini digunakan untuk memasuki lingkungan pesantren yang konservatif terkait isu gender dan kesehatan reproduksi:

4.2.1 Sowan dan Negosiasi

Data dari hasil wawancara dengan Aliansi Inklusi Jombang memperlihatkan dimensi yang lebih rinci tentang bagaimana kata *sowan* berfungsi tidak hanya sebagai pembuka akses, tetapi juga sebagai mekanisme negosiasi. Ketika ditanya bagaimana pendekatan terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilakukan, koordinator KDS Plus mendeskripsikan praktik dua tahap berikut:

(3) Kita *sowan* atau kita kunjungi ke kantornya ketika mereka dalam forum mereka sudah berjanji kita note. Satu Minggu 2 Minggu pada tindakan satu bulan kita temui pribadi sana kita kontrol bapak. (Koordinator KDS Plus)

Tuturan di atas memperlihatkan bahwa kata *sowan* memiliki makna pertemuan pertama (forum) yang memosisikan pejabat sebagai pihak yang memberikan komitmen. Selanjutnya kata *sowan* disinonimkan dengan kata *kunjungi* dan *temui*. Dalam konteks kalimat di atas, kata *sowan* dan sinonimnya tadi memosisikan aktivis sebagai pihak yang "menagih" respons. Dalam konteks tuturan tersebut, tindakan menagih ini tidak dilakukan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui kunjungan personal yang dikemas dalam ranah *silaturahmi*, sehingga kemungkinan terjadinya penolakan dari kunjungan tersebut menjadi jauh lebih sulit secara sosial.

Frasa *kita kontrol bapak* mengandung muatan pragmatis yang khas. Dalam konteks bahasa Jawa dan Indonesia, kata *kontrol* di sini bukan bermakna "mengawasi dari atas" melainkan "memeriksa dengan perhatian". Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah pelunakan semantis yang menjaga wajah pejabat, tetapi tetap menegaskan akuntabilitas. Wang & Kádár (2023) menyebut hal ini sebagai *face-aggravation* yang disamarkan sebagai *face-saving*, yaitu tindakan yang sebenarnya menuntut pertanggungjawaban tetapi dikemas dalam bahasa dan gestur relasional yang sopan.

Dimensi temporal dalam tuturan pada data 3 di atas juga cukup signifikan: "*satu minggu, dua minggu, satu bulan*" menunjukkan gradasi kesabaran yang terstruktur. Dalam hal ini penutur tidak menunjukkan pasivitas, melainkan menjadikannya strategi negosiasi yang sadar dengan memberikan jeda yang cukup agar pejabat tidak merasa dikejar, tetapi juga tidak cukup lama agar komitmen dilupakan. Gradasi dalam dimensi temporal ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang ritme birokrasi Jawa, di mana tindakan yang terlalu cepat dapat dipersepsikan sebagai tidak sabar (tidak sopan), sedangkan menunggu terlalu lama dapat membuat komitmen hilang.

4.2.2 *Sowan sebagai Strategi Komplementer*

Dari data hasil wawancara dengan Aliansi Inklusi terlihat pengakuan eksplisit tentang penggunaan dua jalur *sowan* secara bersamaan, yaitu formal dan informal, sebagai strategi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan:

(4) *Apakah melalui jalur viral atau jalur informal? [Jawab:] dua duanya... Ada juga enggak yang yang jadi apa sih namanya yang diinginkan di luar jam juga jadi kayak ngobrol ngobrol informal gitu ya. Jadi kenal secara pribadi direkam gitu apa ya dengan OPD sehingga lebih enak masuknya.* (Aliansi Inklusi/Koordinator KDS plus)

Dari kutipan data di atas, *silaturahmi* yang diwujudkan dengan kata *sowan* dilakukan melalui jalur formal dengan *sowan resmi ke kantor* dan jalur informal '*ngobrol-ngobrol*' di luar jam kerja. Strategi *dual-track* ini secara langsung mencerminkan disebut oleh Heritage & Clayman (2021) sebagai ketegangan antara *institutional talk* dan *ordinary conversation* dalam situasi percakapan institusional. Dalam konteks ini, responden tidak memilih satu di antaranya, melainkan menggunakan keduanya secara berurutan, sehingga percakapan informal berupa *silaturahmi* personal digunakan untuk melembutkan kondisi sebelum pertemuan formal terjadi.

Frasa *lebih enak masuknya* adalah penanda pragmatis yang membutuhkan pemahaman konteks tinggi. "*Enak*" dalam bahasa Jawa-Indonesia tidak sekadar berarti "*mudah*", tetapi juga "*nyaman secara relasional*". Ini adalah suatu kondisi di mana kedua pihak tidak merasa terancam, tidak canggung secara hierarkis, dan dapat berkomunikasi dengan register yang lebih egaliter. Situasi ini diupayakan melalui *silaturahmi* informal sebelum forum formal dan berfungsi sebagai *pre-sequence* (Sidnell & Enfield, 2022) yang memproyeksikan kemungkinan tindakan inti berikutnya berupa advokasi, permohonan, atau penagihan komitmen.

4.2.3 *Ibu Nyai sebagai Agen Mediasi*

Data wawancara dengan wakil dari Dinkes Jombang menunjukkan satu strategi *sowan* yang khusus dan sangat kontekstual, yaitu penggunaan *ibu nyai* (istri kiai) sebagai pintu masuk ke otoritas pesantren, alih-alin melakukan pendekatan langsung kepada kiai sebagai pemimpin pesantren. Hal ini terlihat secara eksplisit dalam kutipan data berikut:

(5) *Bisa berarti ke ibu nyai dulu mendekatan ya mungkin ya ibu ya termasuk... Dinas juga kalau di apa ini. Pimpinan muslimah gitu ya kita mintai tolong bu saya mah ke sana tolong dia aja bu.* (Fasilitator Dinkes Jombang)

Dari perspektif pragmatik budaya (Wang & Kádár, 2023), strategi dengan menggunakan *ibu nyai* ini memiliki tataran analitis yang berbeda. Pada relasional, dalam budaya pesantren Jawa *ibu nyai* memiliki posisi yang unik. Di satu sisi, *ibu nyai* memiliki kedekatan personal dengan kiai (sebagai pasangan hidup) sekaligus memiliki jaringan tersendiri dengan komunitas perempuan pesantren. Dalam hal ini *ibu nyai* berfungsi sebagai penghubung antara dunia eksternal pesantren, yang biasanya membawa perubahan, dan dunia internal pesantren, yang memiliki otoritasnya sendiri.

Pendekatan melalui *ibu nyai* juga dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul. Misalnya direktur LSM perempuan yang secara langsung mendekati kiai untuk membicarakan isu kesehatan reproduksi dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap *frame* otoritas religius dan maskulin kiai. Melalui *ibu nyai*, risiko ini dapat diminimalisir, karena kiai tidak harus menemui dan menghadapi pembicaraan tersebut secara langsung, dan apabila *ibu nyai* berhasil meyakinkan kiai secara internal, kesepakatan yang terjadi seolah-olah lahir dari inisiatif kiai sendiri. Dengan demikian, *face* kiai dapat dipertahankan. Selain itu, menggunakan pihak ketiga (*ibu nyai*) untuk menyampaikan permintaan dapat dikategorikan sebagai *indirect request* (Sidnell & Enfield, 2022). Dengan demikian, respons penolakan pun menjadi lebih sulit dilakukan, sebaliknya respons afirmatif menjadi lebih mungkin terjadi.

4.3 Silaturahmi dan Keanggotaan

Hal yang paling mendasar dari konsep *silaturahmi* sebagai praktik wacana adalah pentingnya kehadiran tubuh (*bodily presence*) dan waktu sebagai bukti keseriusan keanggotaan. Hal ini terlihat dari kutipan data berikut:

(6) "*Tim pendamping memiliki prinsip advokasi yang tepat dan selalu menjunjung tinggi hak-hak siswa. Hal ini yang membuat sekolah tetap percaya dan menjalin komunikasi intens, meskipun dalam kondisi mendesak atau di luar jam kerja sekalipun.*" (Kepsek SLB Jombang)

Frasa "*di luar jam kerja sekalipun*" adalah penanda keanggotaan yang sangat kuat dalam terminologi CA (Sidnell & Enfield, 2022). Dalam konteks birokrasi Indonesia, jam kerja adalah batas institusional yang sangat jelas, di mana interaksi formal berakhir ketika jam kerja juga berakhir. Ketika seseorang bersedia merespons di luar batas ini, maka mereka secara performatif menyatakan bahwa relasi mereka melampaui kategori institusional dan masuk ke kategori personal. Dalam kultur Jawa hal ini setara dengan "teman" atau "keluarga" dalam arti yang lebih fungsional.

Hal ini juga memiliki implikasi besar bagi pemahaman tentang konsep *silaturahmi institusional*. Dalam konsep ini, *silaturahmi* tidak cukup dilakukan dalam konteks formal, karena *silaturahmi* yang "berhasil" dibuktikan oleh kesediaan orang/pihak tersebut untuk hadir di luar batas formal. Misalnya dengan menjawab telepon di malam hari, merespons pesan di akhir pekan, atau hadir dalam momen krisis. Dengan demikian, *silaturahmi* bukan hanya dihitung dari frekuensi kehadiran, tetapi juga dari kualitas dari kehadiran itu. Jika yang terjadi adalah ketidakhadiran, maka *silaturahmi* pun dapat dikatakan gagal dan dapat membawa konsekuensi buruk bagi individu atau institusinya. Dari perspektif Wang & Kádár (2023), ketidakhadiran ini memperlihatkan bahwa *silaturahmi* bukan hanya tentang kehadiran yang menyenangkan, tetapi tentang pengakuan mutual atas keberadaan pihak lain.

Keanggotaan dalam konteks budaya Jawa salah satunya juga ditampilkan dalam bentuk makan bersama (*mangan bareng*), seperti yang terlihat dalam kutipan data berikut:

(7) "*Dalam hal kolaborasi, sekolah juga melibatkan orang tua siswa secara aktif. Pertemuan informal digelar, di mana siswa dan orang tua makan bersama, berdiskusi, dan memperkuat komunikasi dua arah. Kegiatan ini dinilai memperkuat rasa kepercayaan orang tua terhadap sekolah, serta mempererat hubungan emosional antara guru, siswa, dan keluarga.*" (Kepsek SMP 4 Jombang)

Dalam tradisi Jawa dan Islam-Jawa, berbagi makanan adalah tindakan yang memiliki dimensi sakral. Secara simbolis, berbagi makanan melarutkan batas-batas sosial dan hierarki formal. Ketika guru dan orang tua makan bersama bukan di rapat formal, melainkan dalam suasana informal dengan makanan, maka relasi yang terjalin adalah relasi kekeluargaan, bukan lagi relasi institusional. Carbaugh (2022) menyebutnya sebagai *enacted cultural discourse* atau diskursus budaya yang tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan melalui tindakan fisik bersama. Kepercayaan orang tua terhadap sekolah tentang isu sensitif seperti kesehatan reproduksi tidak dapat dibangun hanya melalui sosialisasi lewat PowerPoint, ia memerlukan momen-momen di mana batas antara "sekolah" dan "keluarga" menjadi kabur, dan makan bersama adalah cara yang paling efisien untuk mengaburkan batas tersebut.

Secara analitis, praktik ini menunjukkan bahwa *silaturahmi* khususnya dalam konteks pendidikan beroperasi pada tataran yang lebih dalam dari sekadar membangun kepercayaan untuk program tertentu. *Silaturahmi* dengan cara makan bersama dapat membangun keanggotaan dalam komunitas yang lebih luas dari sekadar komunitas orang tua, guru, dan anak. yang peduli bersama pada kesejahteraan generasi berikutnya. Inilah yang membuat program pendidikan reproduksi di SMP 4 berkelanjutan bahkan ketika program RHRN berakhir: ia sudah berakar dalam jaringan *silaturahmi* yang melampaui batas program.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *silaturahmi* bukan sekadar warisan tradisi yang statis, melainkan instrumen pragmatis yang vital dan adaptif dalam praktik wacana di Indonesia, khususnya Jawa. Analisis data menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, *silaturahmi* berfungsi sebagai investasi relasional jangka panjang dalam konteks birokrasi, yang secara bertahap menggeser dinamika kekuasaan dari hierarki formal menuju kemitraan yang sifatnya lebih horisontal. *Silaturahmi* pun beroperasi pada berbagai skala, misalnya dari kunjungan kepada kiai di pesantren besar hingga pertemuan makan bersama dengan orang tua siswa. Kedua, dalam lingkungan pesantren, praktik *sowan* sebagai bentuk *silaturahmi* hierarkis berhasil menembus resistensi ideologis dengan menempatkan otoritas agama sebagai agen legitimasi, bukan objek negosiasi. Ketiga, *silaturahmi* dalam ranah akademis beroperasi sebagai modalitas komunikasi bertahap yang secara strategis melunakkan ketegangan antara identitas institusional dan isu-isu sensitif.

Silaturahmi pun bukan hanya bermakna hadir dengan secara fisik, tetapi juga dapat menjadi bukti keanggotaan melalui waktu dan tubuh. Kehadiran di luar jam kerja dan boikot sebagai respons atas ketidakhadiran menunjukkan bahwa *silaturahmi* memiliki norma, yang jika dilanggar terdapat konsekuensi konkret atas pelanggaran tersebut. Selain itu, di era digital ini *bersilaturahmi* secara fisik tidak dapat digantikan oleh gawai dan media digital lainnya. Namun, komunikasi digital misalnya dengan WhatsApp dapat dikategorisasikan sebagai *pra-sowan*, sebelum dilakukan *sowan* yang sesungguhnya. Dalam hal ini, media digital hanya berfungsi sebagai medium, bukan pengganti *silaturahmi* fisik.

Selanjutnya secara teoretis, studi ini juga menunjukkan bahwa konsep-konsep yang sudah tertanam dalam budaya Jawa tidak hanya bertahan di era modernisasi, tetapi mengalami *refungsionalisasi pragmatis*. Dalam konteks *silaturahmi*, terjadi transformasi yang memungkinkan nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam diskursus publik modern. Temuan ini memperkaya kerangka CA dengan dimensi budaya Asia Tenggara khususnya Indonesia dan memperluas cakupan CDA dengan analisis kasus dari konteks Indonesia, khususnya Jawa.

Penelitian ini pun memungkinkan untuk dilanjutkan dengan mengeksplorasi lebih dalam fenomena *digital silaturahmi* dan implikasinya bagi efektivitas negosiasi di ruang sipil yang semakin bermigrasi ke ranah daring. Kajian komparatif antara berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang budaya yang berbeda juga akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang variasi regional dalam praktik *silaturahmi* dan *bersilaturahmi*.

REFERENSI

- Ariana, E. F. 2023. *Fenomena Tilik Sebagai Upaya Menjalin Silaturahmi (Fenomena Di Desa Sanggung, Gatak, Sukoharjo)*. IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary, 1(5).
- Carbaugh, D. 2022. *Cultural Discourses in Interaction*. Routledge.
- Ewing, M. C. 2001. The Ins and Outs of Discourse: The Role of *Ya* and Other Discourse Markers in Indonesian. *Journal of Pragmatics*, 33(9), 1281–1307.
- Heritage, J., & Clayman, S. 2021. *Talk in Action: Interactions, Identities, and Institutions*. Wiley-Blackwell.
- Rahardi, R. K. 2020. Pragmatic Meanings of Javanese Phatic Marker '*Sampun*': Culture-Specific Pragmatic Perspective. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 20(1).
- Rahardi, R. K., Rahmat, W., & Kurniawan, Y. 2023. Pseudo-Directive Speech Act in the Javanese Language: Culture-Specific Pragmatic Perspective. *Jurnal Arbitrer*, 10(1).
- Sidnell, J., & Enfield, N. J. 2022. *The Handbook of Conversation Analysis*. Wiley.
- Situngkir, H. 2008. Spreading of Information Through '*Silaturahmi*' Network. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1098474>
- Wang, W., & Kádár, D. Z. 2023. *Politeness, Face and Culture in East Asian Interaction*. Cambridge University Press.
- Wodak, R., & Meyer, M. 2023. *Methods of Critical Discourse Studies*. SAGE.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Dian Ekawati	Departemen Linguistik, Universitas Padjadjaran	S3 Linguistik and Intercultural Communication	Linguistik terapan, analisis wacana, pragmatik budaya
Isma Novitasari	Independent Researcher	S2 International Health	Kesehatan masyarakat, studi gender